

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi sektor publik menjadi bagian yang sangat penting dalam pemerintahan yang termasuk dalam salah satu alat dari sistem penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Reformasi manajemen keuangan daerah perlu dilaksanakan dalam otonomi daerah. Sesuai dengan otonomi daerah yang berlaku, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri demi kelangsungan hidup masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah menyebabkan masyarakat menuntut pemerintah setempat untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih baik kedepannya. Bentuk pertanggungjawaban oleh pemerintah atas pengelolaan yang baik dapat dilihat dari laporan keuangan dari hasil kinerja pemerintah daerah (Erlina dan Rasdianto, 2013).

Kata kunci yang sering disebutkan oleh berbagai organisasi yang ada adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Hal tersebut menjadi gambaran dalam peningkatan, pelaksanaan, dan pencapaian suatu program kegiatan dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah dapat dikatakan sebagai hasil atau keluaran dari suatu kegiatan maupun program yang

hendak atau sudah dicapai, menyangkut tentang penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terstruktur. Keberhasilan dari suatu organisasi pemerintahan tidak hanya diukur dari segi laporan keuangannya saja, namun keberhasilan tersebut juga dapat dilihat dari kinerja pemerintah daerah yang menjalankan seluruh proses kegiatan melalui pikiran dan usaha kerja kerasnya.

Saat ini pemerintah daerah menerima banyak tuntutan baik itu dari pihak internal dalam meningkatkan kinerja, dan tuntutan dari pihak eksternal yaitu masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 4 aparat pemerintah harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pelayanan yang dapat mewujudkan keinginan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk menunjukkan kinerja dari pemerintah daerah.

Pada penelitian ini ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penggunaan variabel independen pada penelitian ini nanti akan menjadi alat ukur suatu organisasi dalam menentukan kesuksesan dalam meningkatkan kinerjanya, baik itu didukung dengan teoritis maupun praktisnya. Selain itu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen pada penelitian ini mengarah pada hasil yang dijalankan selama proses kegiatan yang menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Pengelolaan keuangan menjadi faktor yang pertama yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dari kinerja pemerintah daerah agar hasilnya

lebih baik. Namun pada kenyataannya beberapa pemerintah daerah belum menjalankan tujuan, fungsi, dan perannya secara baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005, Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sehingga untuk melihat pengelolaan keuangan yang baik diperlukan akuntabilitas kinerja yang berkaitan dengan perencanaan strategis yang ingin dicapai untuk dana yang telah dialokasikan oleh pemerintah.

Selanjutnya kinerja pemerintah daerah harus selalu diawasi dalam melaksanakan tugas pemerintahannya, sehingga pengawasan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan suatu daerah untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang berjalan dengan baik. Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna (Halim, 2002). Dalam mencapai suatu tujuan pemerintahan harus diiringi dengan pengawasan yang semaksimal mungkin (Purnama dan Nadirsyah, 2016). Agar berjalan sesuai dengan tujuan awal organisasi, maka pemerintah perlu mengawasi pelaksanaan penyusunan dari laporan keuangan yang akan mencerminkan seberapa baik kinerja dari pemerintah daerah. Maka dari itu pengawasan keuangan juga dapat menghasilkan kinerja yang baik pula untuk kedepannya sehingga dapat mencegah atau memperbaiki kesalahan sebelumnya (Purnama dan Nadirsyah, 2016).

Sumber daya manusia juga dapat menjadi faktor penentu keberhasilan dari kinerja pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam lingkungan pemerintah. Sutrisno (2015) mengatakan bahwa sumber daya manusia merupakan seorang karyawan yang siap dan siaga serta mampu mencapai tujuan dari suatu visi dan misi organisasi. Untuk dapat meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik, pemerintah perlu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dipercaya, sehingga mampu mencapai prestasinya dengan menunjukkan hasil kinerja yang baik.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan, pengawasan keuangan, dan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mencapai keberhasilan dari kinerja pemerintah daerah. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja pemerintah daerah yang dapat dilihat dari predikat yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Hasil penelitian dari ketiga faktor tersebut telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian pertama menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Padang Pariaman (Hidayat, 2015). Selanjutnya, penelitian yang kedua diperoleh dari Syaifudin (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya (Purnama dan Nadirsyah, 2016). Penelitian keempat menunjukkan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah (Badruzzaman,

2018). Penelitian kelima menunjukkan bahwa pengaruh penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Klaten (Kristiastanti, 2018).

Peneliti termotivasi untuk menguji kembali penelitian terdahulu dengan menggabungkan beberapa variabel yang sebelumnya telah diteliti secara terpisah, yaitu pengelolaan keuangan daerah pada penelitian Hidayat (2015), pengawasan keuangan daerah pada penelitian Purnama dan Nadirsyah (2016) dan Badruzzaman (2018), dan kualitas sumber daya manusia Syaifudin (2017). Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang didapatkan semuanya berfokus pada kinerja pemerintah daerah. Sehingga menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih kinerja pemerintah daerah sebagai variabel dependen yang nantinya diukur menggunakan penelitian Kristiastanti (2018). Selain itu penelitian dengan menggabungkan ketiga variabel independen diatas belum pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Sehingga dengan adanya penggabungan variabel-variabel independen tersebut dapat memperbaiki riset-riset yang sebelumnya pernah ada.

Terdapat beberapa isu yang terkait dengan Kabupaten Barito Timur. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, pasien COVID-19 di Kabupaten Barito Timur semakin meningkat (bisnis.com). Hal tersebut sangat berdampak pada kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur, yang pada saat itu banyak dari aparat pemerintah melaksanakan pekerjaannya dengan cara *Work From Home* (WFH) yang mengakibatkan pekerjaan kantor yang kurang produktif. Awal tahun 2021, Bupati Barito Timur juga menyampaikan bahwa perlu adanya tindakan pencegahan COVID-19. Serta menekankan kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk

terus meningkatkan kinerja dan dapat memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing (baritorayapost.com).

Kemudian pada tahun 2021 diadakannya Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) yang dilaksanakan oleh DPRD Barito Timur yang dihadiri pihak eksekutif dan perwakilan masyarakat, dari hasil rapat tersebut ada 14 poin yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat. Namun, pihak eksekutif menerangkan bahwa poin-poin tersebut tidak sepenuhnya terjadi, dan ada beberapa masalah yang telah dibenahi (borneonews.co.id). Hal tersebut terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Barito Timur paling rendah di Kalimantan Tengah, hal ini bisa terjadi karena pemerintah daerah terlalu tinggi menargetkan pendapatan daerah tanpa memperhatikan potensi yang dimiliki. Sehingga, pemungutan terhadap potensi pajak dan retribusi kurang optimal karena dampak dari pandemi COVID-19.

Selanjutnya permasalahan yang terjadi adalah DPRD Barito Timur sebagai pihak yang memiliki fungsi pengawasan dinilai masih rendah. Terbukti dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di kabupaten tersebut masih rendah karena kurangnya pengawasan dari pihak DPRD setempat (matakalteng.com). Oleh karena itu masyarakat di Kabupaten Barito Timur memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah setempat untuk menjadi catatan dan masukan kedepannya dalam melaksanakan kerjanya, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Barito Timur.

Peneliti tertarik untuk menggunakan Kabupaten Barito Timur sebagai subjek penelitian, karena dari masalah-masalah yang tertera di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Barito Timur masih kurang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Peneliti juga ingin membuktikan apakah yang dikatakan oleh masyarakat setempat itu benar adanya, atau justru menyimpang dari kenyataannya, karena opini atau pendapat seperti itu juga dapat merugikan pemerintah, serta merusak citra pemerintahan di kabupaten tersebut. Selain itu dengan dipengaruhi adanya pandemi COVID-19, akan meningkatkan kinerja atau justru menurunkan kinerja daerah tersebut. Di Kabupaten Barito Timur pemerintah juga mengubah jam operasional kerja untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan ada sebagian dari pemerintah juga melaksanakan tugasnya dari rumah. Selain itu alasan pemilihan subjek penelitian ini karena penelitian dengan judul yang sama belum pernah dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Barito Timur?
2. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Barito Timur?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Barito Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menguji kembali variabel yang terdapat dari penelitian sebelumnya tentang pengelolaan keuangan (Hidayat, 2015), dengan menggabungkan variabel baru yaitu pengawasan keuangan (Purnama dan Nadirsyah, 2016), dan variabel kualitas sumber daya manusia (Syarifudin, 2017). Sehingga dari penggabungan variabel yang ada menjadikan sebuah teori baru dan penelitian tersebut menggunakan variabel dependen yang sama yaitu kinerja pemerintah daerah. Subjek yang akan diteliti adalah Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan, sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan peneliti berikutnya untuk lebih memperdalam penelitian keuangan daerah. Sehingga mampu memberikan manfaat teoritis, serta menambah pengetahuan mengenai keuangan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pengawasan keuangan, dan kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur. Selain itu, penelitian ini dapat membantu penelitian sejenis dan dapat

menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya dengan menambah atau mengubah variabel-variabel yang ada.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur melalui variabel pengelolaan keuangan, pengawasan keuangan dan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian untuk evaluasi dalam melaksanakan tugas yang ada dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat lima bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan statistika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi teori yang menjadi dasar penulisan dalam penelitian ini, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi objek, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, data dan teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL

Bab ini berisi penjelasan hasil penyebaran kuesioner, demografi responden, uji alat, uji normalitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.